

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Persoalan kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Diharapkan, melalui kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini membantu proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi kebebasan terutama pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal sehingga tercipta pembangunan yang baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik lagi, dan pemerintah lokal dapat lebih fokus menjalankan pemerintahannya untuk memajukan sarana, infrastruktur bahkan sumber daya alam dan manusia sekalipun lewat kebijakan otonomi daerah ini.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut APBD ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Faktor kedua yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Selain mengandalkan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerah, Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan juga mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini mengakibatkan perolehan PAD antara kabupaten dan Kota sangat berbeda, karena jenis potensi pajak dan retribusi yang dapat ditarik oleh pemerintah kota lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten. Dari beberapa pungutan pajak antara kota yang lebih berpotensi dari pada kabupaten, maka dalam penelitian ini menggunakan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Artinya bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan faktor terakhir yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. DAU dan DAK berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Semakin besar dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Dyah Arsita Sari (2013) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali dan penelitian yang dilakukan oleh Nyoto Setiyono (2011) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008 dan 2009. Pada dasarnya penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk terdapat adanya perbedaan yaitu perbedaan variabel, waktu dan kota yang akan diteliti salah satunya yaitu variabel PDRB, pada penelitian yang dirujuk tidak adanya variabel PDRB ini sedangkan PDRB juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belanja daerah. Terdapat indikasi masalah/fenomena dari penelitian yang dirujuk karena adanya hasil penelitian yang berbeda didalam penetapan anggaran belanja daerah karena tidak sesuai dengan meningkatnya dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, dalam hal ini kondisi keuangan pemerintah daerah membelanjakan lebih banyak atau lebih boros menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu dana alokasi umum dibandingkan menggunakan dana sendiri yang disebut dengan pendapatan asli daerah dan pemerintah daerah juga terlalu menggantungkan dana alokasi umum untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, batasan masalah adalah pada pengambilan sampel pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kota Prabumulih dan Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Empat Lawang, dengan periode penelitian ini adalah tahun 2013 – 2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui bahwa PDRB, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara simultan pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sektor publik.
2. Untuk Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan.
3. Bagi Pemerintah, khususnya pemerintah kota dan kabupaten hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam memprediksi belanja daerah.
4. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini penulis hanya akan menguraikan dan memberikan gambaran mengenai penyusunan skripsi secara garis besar. Sistematika penulis tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu : Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab landasan teori ini, penulis akan menyajikan pendapat para ahli akuntansi. Hal-hal yang akan dikemukakan pada bab ini meliputi pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto,

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Belanja Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini merupakan bagian terpenting dalam laporan skripsi ini karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari website internet dan melakukan pembahasan analisis data dengan melakukan perhitungan analisis ilmu statistik dibantu dengan program SPSS untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan laporan skripsi ini, dimana penulis membuat simpulan dari analisis dan pembahasan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.